

LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR NUSAMBA TEGALLALANG



TAHUN **2021**

bank terdaftar dan diawasi simpanan aman dijamin lps



BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT. BPR Nusamba Tegallalang pada tahun 2021 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2021 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

BPR NusambaTegallalang memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK sehingga BPR Nusamba Tegallalang dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Gianyar. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Nusamba Tegallalang didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR NusambaTegallalang.

BPR Nusamba Tegallalang telah beroperasi lebih dari 30 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Nusamba Tegallalang selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan

Di sepanjang 2021 dan untuk di tahun mendatang, BPR Nusamba Tegallalang terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Made Suwitrayasa, SE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan tujuan dan strategi bank untuk jangka panjang, menengah, maupun tahunan dan dibentuk dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sebelum diajukan ke OJK 2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan mencanangkan komitmen integritas serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi 3. Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan dan meminta pertimbangan dewan komisaris sebelum disahkan menjadi ketentuan 4. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) 5. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya 6. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan bank secara periodik dan terus menerus 7. Membuat laporan kinerja tahunan sebagai dokumentasi keuangan secara transparan 8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada dewan komisaris dan pemegang saham melalui RUPS. 9. Bertanggung jawab dalam penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. 		
2.	Nama	:	I Nyoman Suarjana, SH
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan tujuan dan strategi bank untuk jangka panjang, menengah, maupun tahunan dan dibentuk dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sebelum diajukan ke OJK 2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan mencanangkan komitmen integritas serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi 3. Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan dan meminta pertimbangan dewan komisaris sebelum disahkan menjadi ketentuan 4. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) 		

5. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya
6. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan bank secara periodik dan terus menerus
7. Membuat laporan kinerja tahunan sebagai dokumentasi keuangan secara transparan
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada dewan komisaris dan pemegang saham melalui RUPS.
9. Bertanggung jawab dalam penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Memantau pelaksanaan kebijakan strategi yg memadai untuk pertumbuhan kredit dan perhitungan bunga anuitas yg pelaksanaannya dilakukan setiap minggu
2. Melakukan Assesment secara bertahap dan telah dilakukan simulasi dampak atas pemberlakuan POJK 48 tahun 2020 dan POJK 2 tahun 2021
3. Melakukan evaluasi dan rotasi sebagai proses kaderisasi SDM untuk mendukung program pengembangan jaringan dan peningkatan produktivitas.
4. Melakukan monitoring dan mitigasi risiko kredit serta penempatan dana
5. Melakukan FGD diawal bulan untuk mengevaluasi pertumbuhan kredit pasca pandemi
6. Melakukan disiplin eksekusi terhadap kredit bermasalah sesuai dengan action plan yg telah dibuat
7. Protokol kesehatan sudah berjalan sesuai dengan SOP pencegahan dan penanganan Covid-19 yg berlaku sejak 5 Juli 2021
8. Menjaga kondisi likuiditas tetap sehat minimal 12%
9. Pemantauan terhadap kredit restrukturisasi berpotensi tidak mampu bertahan telah dilakukan secara masif oleh Team PPK dengan kunjungan langsung untuk pembinaan dan memonitor perkembangan sumber angsuran debitur secara detail guna mengantisipasi risiko NPL yg akan terjadi
10. Team PPK telah merumuskan strategi penyelesaian NPL melalui action plan yg telah dibuat
11. Sampai dengan Desember 2021 belum dilakukan penilaian kembali agunan namun PPAP sudah terpenuhi 100%
12. Direksi sedang dalam proses menyusun SOP Reward dan Punishment sebagai pedoman untuk mengukur produktifitas jaringan dan SDM
13. Direksi telah melakukan promosi terhadap 1 orang AO ke Kepala Kantor Kas sebagai penyerahan dan mempersiapkan kaderisasi dimasa yg akan datang.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	I Ketut Komplit, SH
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi nasehat kepada direksi 2. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan manajemen bank 3. Menyetujui dan mengevaluasi rencana kerja, anggaran manajemen, kebijakan manajemen risiko serta memutuskan permohonan atas usulan direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan direksi. 4. Melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis BPR Nusamba Tegallalang dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik. 5. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan 6. Memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. 		
2.	Nama	:	I Made Artana, SE
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama-sama Komisaris Utama Memberi nasehat kepada direksi 2. Bersama- sama Komisaris Utama Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan manajemen bank 3. Bersama- sama Komisaris Utama Menyetujui dan mengevaluasi rencana kerja, anggaran manajemen, kebijakan manajemen risiko serta memutuskan permohonan atas usulan direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan direksi. 4. Bersama- sama Komisaris Utama Melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis BPR Nusamba Tegallalang dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik. 5. Bersama- sama Komisaris Utama Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan 6. Bersama- sama Komisaris Utama Memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. 		

Rekomendasi Kepada Direksi :

1. FGD dalam evaluasi pertumbuhan dan kualitas kredit pasca Covid-19 intensitasnya ditingkatkan
2. Menerapkan disiplin eksekusi terhadap kredit bermasalah sesuai dengan action plan yang telah dibuat
3. Memantau kebijakan strategi yg memadai untuk pertumbuhan kredit dan perhitungan bunga anuitas menjadi alternatif pilihan pengembangan
4. Melakukan Assesment terhadap debitur restrukturisasi Covid-19 dengan seksama menggunakan metode klasifikasi berdasarkan permasalahan debitur (bertahan dan tidak mampu bertahan)
5. Melakukan proses kaderisasi sumber daya untuk mendukung program pengembangan jaringan dan peningkatan produktivitas
6. Mitigasi risiko kredit dan penempatan dana
7. Melaksanakan protokol kesehatan
8. Menjaga kondisi likuiditas tetap sehat minimal 12% tanpa mengesampingkan produktivitas ABA
9. Melakukan pemantauan yg masif terhadap kredit restrukturisasi berpotensi tidak bertahandengan detail dan merumuskan strategi antisipasi atas risiko NPL
10. Merumuskan strategi dan penyelesaian NPL
11. Manajemen segera melakukan penilaian kembali agunan kredit bermasalah dan memenuhi kekurangan PPAP sesuai regulasi
12. Evaluasi produktivitas jaringan dan SDM berdasarkan standar yg terukur
13. Mempersiapkan kaderisasi melalui pola tour of dutty (rotasi dan mutasi) dan penyegaran.

Penjelasan Lebih Lanjut :

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR tidak memiliki komite/nihil	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Nihil			

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Program : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2.	Komite Pemantau Risiko
	Program : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi

Program	:	-
Realisasi	:	-
Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil		

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Made Suwitrayasa, SE	Rp0,00	0%
2.	I Nyoman Suarjana, SH	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
kepemilikan saham anggota direksi pada BPR Nusamba Tegallalang tidak ada			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Made Suwitrayasa, SE			
2.	I Nyoman Suarjana, SH			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota direksi tidak memiliki saham di BPR lain dan perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Made Suwitrayasa, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Nyoman Suarjana, SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Made Suwitrayasa, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Nyoman Suarjana, SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Ketut Komplit, SH	Rp0,00	0%
2.	I Made Artana, SE	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak ada kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Ketut Komplit, SH			
2.	I Made Artana, SE			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	I Ketut Komplit, SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Artana, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keuangan pada BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	I Ketut Komplit, SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Artana, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga pada BPR				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)
1.	Gaji	2	Rp442.600.000,00	2	Rp228.400.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp232.500.000,00	2	Rp103.900.000,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp675.100.000,00		Rp332.300.000,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Rumah Dinas (1)	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas (2)	Mobil Dinas (1)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Tunjangan Pulsa (2), Asuransi Jiwa (2), DPLK (2), BPJS Ketenagakerjaan (2)	Tunjangan Pulsa (2), Asuransi Jiwa (2), DPLK (2), BPJS Ketenagakerjaan (2)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan RUPS			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.5 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.8 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.5 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	1. Maret 2021	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan 2. Kinerja s/d Pebruari 2021 3. Evaluasi tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris Triwulan IV tahun 2020 4. Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan APU PPT 5. Isu-isu strategis pengembangan 6. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk pengembangan dan perbaikan kinerja kepada Direksi 7. Penutup
2.	15 Juni 2021	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan 2. Kinerja s/d Mei 2021 3. Evaluasi tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris Triwulan I tahun 2021 4. Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan APU PPT 5. Isu-isu strategis pengembangan 6. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk pengembangan dan perbaikan kinerja kepada Direksi 7. Penutup

3.	1. September 2021	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan 2. Kinerja s/d Agustus 2021 3. Evaluasi tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris Triwulan II tahun 2021 4. Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan APU PPT 5. Isu-isu strategis pengembangan 6. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk pengembangan dan perbaikan kinerja kepada Direksi 7. Penutup
4.	14 Desember 2021	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan 2. Kinerja s/d Nopember 2021 3. Evaluasi tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris Triwulan III tahun 2021 4. Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan APU PPT 5. Isu-isu strategis pengembangan 6. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk pengembangan dan perbaikan kinerja kepada Direksi 7. Penutup
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 4 kali dalam tahun 2021			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	I Ketut Komplit, SH	0	4	100%
2.	I Made Artana, SE	0	4	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2021 (tahun laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yg dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi, Pegawai tetap dan Pegawai tidak tetap pada BPR Nusamba Tegallalang								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	4	0
Dalam Proses Penyelesaian	4	0
Total	8	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Seluruh permasalahan hukum yg dihadapi merupakan permasalahan hukum perdata, yg manasemua permasalahan hukum yg dihadapi merupakan gugatan dari BPR ke Nasabah		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
PT. BPR Nusamba Tegallalang tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pada tahun 2021 BPR tidak ada memberikan Dana untuk kegiatan sosial maupun Kegiatan Politik					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUMPENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR Nusamba Tegallalang
 Alamat : Jalan Raya Tegallalang Gianyar
 Nomor Telepon : 0361980805
 Posisi Laporan : Desember 2021
 Modal Inti : Rp8.099.598.832,00
 Total Aset : Rp70.071.243.666,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Nusamba Tegallalang Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.1 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.67	0.334
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.94	0.291
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.39	0.239
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.35	0.235
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	0.05
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3	0.3
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.9	0.143
10	Rencana Bisnis BPR	2.17	0.163
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.9	0.143
Nilai Komposit			2.1
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periodetanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.67)

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di BPR Nusamba Tegallalang telah memenuhi jumlah kecukupan, komposisi, dan kompetensi serta telah lulus uji Fit & Proper Test. Sehingga dalam pelaksanaannya mampu bertanggung jawab serta mengambil keputusan secara profesional dan independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian seperti, tindak lanjut hasil audit intern, mengkomunikasikan kebijakan strategis di bidang kepegawaian, dan peningkatan kinerja BPR lebih diperhatikan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.94)

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris sudah memadai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Dewan Komisaris telah lulus uji Fit & Proper Test sehingga integritas dan reputasi yang dimilikinya mampu bertanggung jawab kepada Pemegang Saham serta stakeholders secara independen. Dewan Komisaris juga memiliki pedoman dan tata tertib dalam menjalankan tugas, sehingga mampu mengontrol, memberikan saran dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

tidak menerapkan komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Benturan kepentingan yang mungkin terjadi pada BPR Nusamba Tegallalang telah diatur dalam Pedoman Benturan Kepentingan yang berlaku sejak 27 Desember 2016 dan juga terdapat dalam pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan diberlakukannya Pedoman Benturan Kepentingan tersebut memungkinkan Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengambil keputusan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindari tindakan yang merugikan Bank.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.39)

Pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan Bank di BPR Nusamba Tegallalang telah diterapkan secara aktif dan independen oleh Direksi dan disertai komitmen yang tinggi dari seluruh elemen Bank, maka penetapan kebijakan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di seluruh aktifitas Bank dapat berjalan efektif. Satuan kerja operasional dalam pengelolaan usaha Bank telah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.35)

Pada BPR Nusamba Tegallalang Satuan Kerja Audit Internal selaku yang bertanggung jawab menjalankan fungsi audit intern menjalankan fungsinya secara efektif sesuai pedoman intern dan standard minimum yang ditetapkan dalam Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern. Langkah perbaikan selalu direkomendasikan termasuk apabila terdapat hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan oleh oknum staf melalui rekomendasi yang independen dan objektif sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

Penerapan fungsi audit ekstern di BPR Nusamba Tegallalang dilakukan dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, serta sesuai dengan persyaratan minimum yang telah ditetapkan, sehingga hasil audit dan management letter yang disampaikan oleh KAP kepada BPR lengkap dan transparan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 3)

Untuk BPR yang modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) penerapan Manajemen Risiko akan berlaku efektif pada semester 2 tahun 2021.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)

BPR Nusamba Tegallalang telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang batas maksimum pemberian kredit kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.17)

Rencana Bisnis Bank disusun secara realistis melalui proses kebijakan dan prosedur yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi BPR Nusamba Tegallalang sesuai dengan visi dan misi Bank, termasuk memperhatikan faktor eksternal, faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis Bank yang telah disusun tersebut pelaksanaannya selalu dalam pengawasan Dewan Komisaris sehingga realisasi rencana yang sudah dicantumkan dalam RBB dapat dilakukan secara konsisten dan mengarah pada pencapaian keberhasilan usaha Bank.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.9)

Sistem pelaporan keuangan pada BPR Nusamba Tegallalang sudah transparan kepada publik melalui media surat kabar maupun melalui home page Nusamba Tegallalang. Informasi keuangan dan non-keuangan dapat tersedia tepat waktu, lengkap, kini dan utuh. Produk dan jasa Bank diinformasikan transparan dengan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah secara efektif, termasuk memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai Pelaporan tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dan telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional BPR Nusamba tegallalang masih dibutuhkan SDM yang berkualitas untuk meningkatkan kinerja dimasa yg akan datang, namun hal tersebut sedikit demi sedikit diatasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan secara rutin.

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon

perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini.

Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengkover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2021 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator.

Gianyar, 22 April 2022

PT. BPR Nusamba Tegallalang

Menyetujui


**bank
nusamba**
bpr nusamba tegallalang
Made Suwitrayasa, SE
Direktur utama


I Ketut Komplit, SH
komisaris utama